Brainy
Volume 3, No. 2, Bulan Desember 2022, Halaman. 18-27
ISSN 2962-4622

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, PENERAPAN IT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Dede Suryato[1], R. Muchammad Noch[2.]

[1,2]*Universitas Pasundan, Jl. Tamansari No.6-8, Bandung 40116 Indonesia*

received: 21/10/2022; revised: 17/11/2022; published: 16/12/2022

ABSTRACT

This study is entitled "The Effect of Employee Competency, Application of Information Technology and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statements". This study aims to determine the magnitude of the Influence of Employee Competency, Application of Information Technology and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statements Registered in Bandung City Government. The research method used is descriptive and verification methods. In this study from Bandung City Government using non-probability sampling techniques from the technique, the authors chose the Field Research technique. The type of data used in this study is primary data using data collection techniques in the form of questionnaires. The data of this study were processed using SPSS version 25 to test classic assumptions, multiple linear regression analysis, data normality, validity test, instrument reliability test, correlation analysis, descriptive analysis, verification analysis, partial and simultaneous hypothesis testing. Employee Competency Utilization, Application of Information Technology, and Internal Control Systems simultaneously had a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements of 73.9% while the remaining 26.1% was contributed by other variables not examined. Employee competency has an effect of 16.0%, Application of Information Technology has an effect of 30.1%, Internal Control System has an effect of 27.8%.

Keywords:
Employee Competency, Application of Information Technology, Internal Control Systems and Quality of Financial Statement

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Kompetensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kompetensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Terdaftar Pada Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dalam penelitian dari Pemerintah Kota Bandung ini menggunakan teknik non-probability sampling dari teknik tersebut, penulis memilih teknik Field Research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 25 untuk menguji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, normalitas data, uji validitas, uji reliabilitas instrumen, analisis korelasi, analisis deskriptif, analisis verifikatif, pengujian hipotesis parsial dan simultan. Pemanfaatan Kompetensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 73,9% sedangkan sisanya sebesar 26,1% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kompetensi pegawai berpengaruh sebesar 16,0%, Penerapan Teknologi Informasi berpengaruh sebesar 30,1%, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh sebesar 27,8%.

Kata Kunci:
Kompetensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan

**dedesuryantho11@gmail.com*

PENDAHULUAN

Konteks kepegawaian sektor publik sudah tentu mengutamakan suatu kompetensi, baik itu kompetensi pribadi maupun kompetensi individu atau kemampuan organisasi tersebut. Hal ini menjadi suatu acuan yang harus diterapkan di setiap lembaga pemerintahan, karena kompetensi sepadan dengan kemampuan atau kecakapan seseorang dalam hal mengintrepetasikan keterampilan, pendidikan dan pengalaman yang telah dialami. Beberapa

studi telah dijelaskan bahwa kemampuan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dikerjakannya. Sama halnya dengan kompetensi yang akan berdampak terhadap kinerja pegawai di instansi sektor publik.

Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000 pasal 12 ayat 1 tentang pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran untuk wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelanggaraan pemerintah yang diatur dalam bentuk undang-undang nomer 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomer 32 tahum 2004 tentang pemerintah daerah. Meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik. (Good Government Governance), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas-dinas dan Badan Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 1. Keterangan Populasi Penelitian

Bagian	Jumlah
Bidang Akuntansi	35 Orang
Bidang SDM	30 Orang
Bidang Pemerdayaan Aset	45 Orang
Jumlah	110 Orang

Tabel 2. Keterangan Sampel Penelitian

Bagian	Jumlah
Bidang Akuntansi	18 Orang
Bidang SDM	8 Orang
Bidang Pemerdayaan Aset	19 Orang
Jumlah	45 Orang

Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas-dinas dan Badan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, maka sampel yang digunakan penulis berjumlah 45 orang yang berhubungan langsung dengan Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Pemerintah Kota

Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling.* Dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu."

Analisis Regresi Linier Berganda Hasil perhitungan dengan menggunakan *software SPSS 25*, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Zero order	Partial	Part
1	(Constant)	1.051	2.589			.687			
	Kompentensi Pegawai (X1)	.141	.062	.239	2.275	.028	.671	.335	.181
	Penerapan Teknologi Informasi (X2)	.331	.096	.392	3.450	.001	.768	.474	.275
	Sistem Pengengalian Internal (X2)	.134	.035	.383	3.851	.000	.725	.515	.307

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: *Output SPSS*

Hasil perhitungan SPSS 25 pada tabel 4.33 diperoleh konstanta (α) sebesar 1,051, koefisien regresi untuk Kompentensi Pegawai (β_1) sebesar 0,141, Penerapan Teknologi Informasi (β_2) sebesar 0,331 dan Keandalan data base (β_3) sebesar 0,134. Berdasarkan nilai di atas dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut $Y = 1{,}051 + 0{,}141X_1 + 0{,}331X_2 + 0{,}134X_3$ Hasil persamaan regresi linier berganda dapat diinterpretasikan.

Nilai konstanta sebesar 1,051 menunjukkan ketika Kompentensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengengalian Internal bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka Kualitas Laporan Keuangan diprediksi akan bernilai sebesar 1,05. Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,141 dan bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa ketika Kompentensi Pegawai (X_1) ditingkatkan satu poin dan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksi akan meningkatkan skor Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,141. Jadi Kompentensi Pegawai yang lebih baik akan menjadikan Kualitas Laporan Keuangan meningkat lebih berkualitas. Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,331 dan bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa ketika Penerapan Teknologi Informasi (X_2) ditingkatkan satu poin dan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksi akan meningkatkan skor Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,331. Jadi Penerapan Teknologi Informasi yang lebih baik akan menjadikan Kualitas Laporan Keuangan meningkat lebih berkualitas.

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,134 dan bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa ketika Sistem Pengengalian Internal (X_3) ditingkatkan satu poin dan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksi akan meningkatkan skor Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,134. Jadi Sistem Pengengalian Internal yang lebih baik akan menjadikan Kualitas Laporan Keuangan meningkat lebih berkualitas.

kuatan asosiasi (hubungan) antara variabel independen dengan variabel dependen ditunjukkan dengan Koefisien korelasi berganda. Hasil perhitungan dengan menggunakan *software* SPSS 25 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860[a]	.739	.720	3.68746

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengengalian Internal (X2), Kompentensi Pegawai (X1), Penerapan Teknologi Informasi (X2)
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.34 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) yang diperoleh adalah sebesar 0,860. Mengacu pada pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi yang diperoleh berada pada interval korelasi antara "0,80 – 1,000" yang berarti masuk dalam kategori hubungan yang "sangat kuat". Jadi Kompentensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengengalian Internal memiliki hubungan yang kuat dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 5. Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860[a]	.739	.720	3.68746

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengengalian Internal (X2), Kompentensi Pegawai (X1), Penerapan Teknologi Informasi (X2)
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai R *Square* sebesar 0,739. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompentensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengengalian Internal memberikan kontribusi pengaruh sebesar 73,9% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Pemerintah Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 26,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi staf akuntansi.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1581.964	3	527.321	38.781	.000[b]
	Residual	557.492	41	13.597		
	Total	2139.456	44			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengengalian Internal (X2), Kompentensi Pegawai (X1), Penerapan Teknologi Informasi (X2)
Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan yang disajikan pada tabel 4.35 di atas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 38,781 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} diperoleh dari tabel distribusi F pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas 1 (db_1) = k (jumlah variabel x) = 3 dan derajat bebas 2 (db_2) = n – k -1 = 41 sebesar 2,83. Nilai F_{hitung} yang diperoleh (38,781) lebih besar dari 2,833 (F_{tabel}) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan Ha diterima. Selain itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkam dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (Hardware dan Software) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tapat waktu (Andriani, 2010 :71).

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemprosesan data atau traksaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadi kesalahan, dan biaya pemprosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Karmila, 2012 : 28).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis

juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah, 2009). Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian internal yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh suatu organisasi dengan tujuan menjamin keandalah catatan baik keuangan dan non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Badara, 2013 : 18). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) Keandalan Laporan Keuangan; (c) Pengamanan aset negara; dan (d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Tuti Herawati (2014) menjelaskan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan dan parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan sebesar 83%. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen peneliti hanya meneliti Sistem Pengendalian Intern, sedangkan penulis menambahkan variable independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Asyifa Nurillah (2014) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen. Penulis meneliti tentang pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan peneliti meneliti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Depok.

Penelitihan ini merupakan pengembangan dari penelitih sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal Pramudiarta (2015), berjudul "Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintahan Daerah (survai pada pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)". Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitihan saya dikota bandung dan perbedaan pada kompentensi pegawai sedangkan punya rizal yaitu kompentensi sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Kompentensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai Kompentensi Pegawai pada Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah cukup kompeten. BPKAD Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas atau unggul dengan kompetensi yang cukup baik. Indikator dengan penilaian terendah diberikan berkaitan dengan *Self concept* (Konsep Diri) dan *Skill* (Keterampilan). Masih banyak dalam pelaksanaanya pegawai belum sepenuhnya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sesama rekan kerja di instansi dan dengan pegawai dengan keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok instansi.

Penerapan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah Optimal. Penerapan Teknologi Informasi pada BPKAD Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah optimal. Indikator dengan penilaian terendah diberikan berkaitan dengan data dan komunikasi data. Maksudnya Terkait dengan pengembangan sistem informasi dan juga mengembangkan kinerja pekerjaan.

Sistem Pengengalian Internal Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah memadai. BPKAD Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki Sistem Pengengalian Internal yang memadai. Indikator dengan penilaian terendah diberikan berkaitan dengan **Penilaian Resiko (*Risk Assessment)***. Instansi belum sepenuhnya memiliki ketegasan mengenai tolak ukur dalam mendorong akuntabilitas kerja pegawai.yang ditunjukkan dengan jawaban jarang dan kadang-kadang.

Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah Memadai. Indikator dengan penilaian terendah diberikan berkaitan dengan Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya berkerja dapat dipahami oleh pengguna. Masih jawaban indidator kadang-kadang, maksud nya pegawai BPKAD kadang-kadang informasi keuangannya disajikan oleh pihak intansi atau pihak pemerintah kota bandung dan kadang-kadang disajikan oleh pihak luar intansi.

Kompentensi pegawai memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pemerintah Kota Bandung. Kompentensi Pegawai yang lebih baik akan menjadikan Kualitas Laporan Keuangan meningkat lebih berkualitas. Kompentensi Pegawai memberikan kontribusi pengaruh sebesar 16,0% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Pemerintah Kota Bandung.

PenerapanTeknologi Informasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Penerapan Teknologi Informasi yang lebih baik akan menjadikan Kualitas Laporan Keuangan meningkat lebih berkualitas. Penerapan Teknologi Informasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 30,1% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Pemerintah Kota Bandung.

Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Sistem Pengengalian Internal yang lebih baik akan menjadikan Kualitas Laporan Keuangan meningkat lebih berkualitas. Sistem Pengengalian Internal memberikan kontribusi pengaruh sebesar 27,8% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Pemerintah Kota Bandung.

Pemanfaatan Kompentensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung secara simultan. Kompentensi Pegawai, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengengalian Internal memberikan kontribusi pengaruh sebesar 73,9% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD

Pemerintah Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 26,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan Bagi instasi Pemerintah Kota Bandung dan BPKAD Pemerintah Kota Bandung diantaranya Kompentensi Pegawai pada Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah cukup kompeten tapi masih banyak dalam pelaksanaanya pegawai belum sepenuhnya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sesama rekan kerja di instansi dan pegawai dengan keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok instansi. Saran saya sebaiknya setiap pegawai di instansi pemerintah harus diberikan pelatihan dan seminar untuk mempererat hubungan satu rekan kerja satu sama lain sehingga menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik.

Sistem Pengengalian Internal Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah memadai. Masalahnya Instansi belum sepenuhnya memiliki ketegasan mengenai tolak ukur dalam mendorong akuntabilitas kerja pegawai.yang ditunjukkan dengan jawaban jarang dan kadang-kadang. Saran saya sebaiknya instansi itu membuat batasan yang akan membuat suatu rekan kerja itu mematuhi aturan tersebut agar starndar itu terpenuhi dengan baik.

Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah Memadai. Indikator dengan penilaian terendah diberikan berkaitan dengan Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat dapat dipahami oleh pengguna. Masih jawaban jarang dan kadang-kadang. Saran saya sebaik nya kualitas laporan keuangan nya dibuat dari tahun ke tahun agar kualitas laporan keuangan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang maksimal agar pendapatan kualitas laporan nya terjamin.

Bagi penelitih selanjutnya disarankan untuk memperbesar jumlah sampel yang ditelitih menambahkan atau merubah variable lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah seperti sistem pengendalian internal dan penerapan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, edisi ketiga.Jakarta:Erlangga.

Edy Sutrisno. 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Kencana Pernada Media Group

Humairoh, N., & Soekardan, D. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja Sistem Informasi Akuntansi dan Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan. Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa, 2(1), 30-35.

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Internasional Federation of Accountants (IFAC). 2014. IAESB: Handbook of International Education Pronouncement. New York.

IAPI. 2011. Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Edisi April 2009. Penerbit IAPI, Jakarta.

Iwan Satibi. 2011. Teknik Penulisan Skripsi Tesis Disertasi Bandung; Ceplas

Martani Dwi., dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*.Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Jogiyanto Hartono. 2009. Sistem Teknologi Informasi.Yogyakarta: Andi.

Kurniawati, A., & Sadeli, D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa, 2(2), 18-24.

Mardi, 2014 Sistem Informasi Akuntansi, Bogor: Grafika Indonesia.

Moeheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali
Muri Yusuf. 2014. Metode Penelitian. Jakarta: Prenadamedia.
Mursyidi. 2013. Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Edisi Revisi.* Bandung:PT Refika Aditama.
Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, edisi tiga.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta
Sutarman. 2012. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Susanto, Azhar, 2013. Sistem Informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan, edisi perdana, Yogyakarta: Andi.
Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*, Edisi tiga. Jakarta: Rajawali Pers
Suhayati,Ely & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tata Sutabri. 2012. Konsep Dasar Informasi. Yogyakarta: Andi
Yani. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Syifa, As, Nurilaah & Dul, Muid. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peranan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Kota Depok.* Diponegoro Journal *Accounting.* Volume 3 No. 2 Tahun 2014
Kadek Leh Sri & Ni luh Gede Erni. 2015. *Pengaruh Penerapan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*: *Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng. e- Journal.* Volume 3 No. 1 Tahun 2015
Indisari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Jurnal SNA. Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya.
Kadir,Abdul. 2011. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Arfianti, Dita. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang). Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro.
Hardyansyah. Ansyarif Khalid Dosen Akuntansi UNISMUH Makassar. 2016. *Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar*. Akuntansi Peradaban: VOL 1, NO. 1 Januari 2016.
Indah, D. Y. (2021). Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Asia Afrika Bandung. Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa, 2(1), 42-45.
Dewi Kusuma Wardani. Ikah Andriyani. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kab Klaten.* Jurnal Akuntansi VOL.5 NO.2 Desember 2017.
Marlinawati. Dewi Kusuma Wardani. 2018. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatwaktuan*

Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kab Gunung Kidul. Jurnal Kajian Bisnis VOL.26 NO.2 Juli 2018.

Reno Julia Utama. 2017. *Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Indragiri Hulu).* JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Febuari) 2017.

Muhammad Rifky Alamsyah, Sri Rayahu, Muhamad Muslih. 2018. *Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok.* Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.15 No.2. 2018

Rizal, Pramudiarta. 2015. *Pegaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintahan Daerah* (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.

Winda, Indriani. 2016. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Bengkulu*. Universitas Bengkulu.

Riedy, Riandani. 2017. Pengaruh Kompentensi SDM, *Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intrn Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). Universitas Negeri Padang.

Elvin, Andrianto. 2017. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi* (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Sleman). Universitas Negeri Yogyakarta.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri RI Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Akuntansi Berbasis Aktual Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

www.bpk.go.id

https://m.mediaindonesia.com/read/detail/213118-inspektorat-cianjur-temukan-penyimpangan-keuangan-desa (Benny Bastiandy:2019) tanggal 27-januari-2019.

https://kabarpriangan.co.id/nandang-aparat-hukum-dan-dprd-wajib-mengontrol-temuan-bpk/ pada tanggal 23 september 2018 (Putra M. Akbar:2018)

https://www.merdeka.com/peristiwa/11-pemda-di-jabar-raih-wtp-bandung-barat masih-wdp.html

https://ppid.bandung.go.id/kb/informasi-publik/informasi-berkala-ppid-kota-bandung/profil-pemerintah-kota-bandung/

https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1060